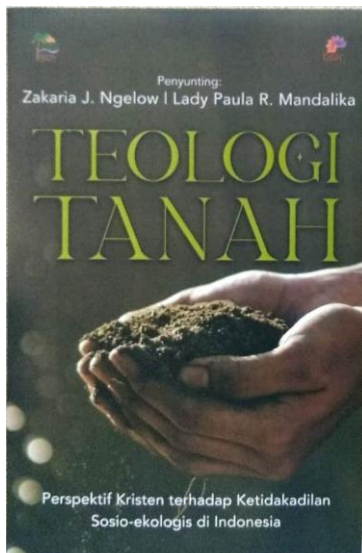




Book Review & Komentar

Judul	: Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia
Penulis buku	: Zakaria J. Ngelow dan Lady Paula R. Mandalika
Penerbit	: BPK Gunung Mulia & Yayasan OA-SE INTIM
Bahasa	: Bahasa Indonesia
Jumlah Hal	: 413 halaman
Tahun Penerbitan	: 2022
Book Reviewer	: Geovanius Wilson Parassa
DOI	: https://doi.org/10.70418/lkt.v3i1.100

Pengantar Umum

Buku *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* merupakan buku bunga rampai yang disunting oleh Zakaria Ngelow dan Lady Mandalika. Di bawah kerja sama BPK Gunung Mulia dan Yayasan OASE INTIM, kumpulan tulisan ini diterbitkan tahun 2022 sebagai cetakan ke dua setelah melewati proses edisi revisi dari cetakan pertama pada tahun 2015. Total keseluruhan halaman dari buku ini adalah 413 halaman yang dibuka dengan 17 halaman mulai dari sampul sampai kata pengantar dan ucapan terimakasih, dan 395 halaman isi dan lampiran singkat profil penulis dan editor.

Buku *Teologi Tanah* mempunyai dua kaitan, yakni (1) sebagai sumbangan guna memanggil gereja dalam pelayanan pemberdayaan dan pendampingan untuk mengatasi konflik agraria yang kian marak di Indonesia, dan (2) sebagai bentuk persembahan dari Yayasan Oase Intim kepada Pdt. John Campbell-Nelson, Ph.D yang menginjak usianya yang ke-65 pada 3 Juni 2015 di tahun buku cetakan pertama ini terbit. Karaya ini adalah wujud tanda terimakasih atas pengabdian dan dedikasi Pdt. John Campbell-Nelson yang senantiasa melaksanakan pelayanan sosial dan menjamah orang-orang yang miskin dan membutuhkan.

Tesis-tesis dalam “Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia”

Kumpulan tulisan ini mengajak pembaca untuk mengundang perhatian dan keprihatinan umat serta gereja terhadap masalah lingkungan dan konflik agraria di Indonesia. Sebagian besar kasus dalam buku ini menggambarkan fenomena perampasan tanah adat yang menimbulkan gesekan antara hak masyarakat atas tanah dan logika pasar yang hegemonik. Kekayaan alam di Indonesia dirusak secara eksploitatif dan berlebihan. Fenomena ini terjadi karena peradaban kapitalisme di era saat ini mendorong ekspansi industri, di tambah lagi persaingan industri juga membuat kerusakan alam kian parah karena harus menjawab kebutuhan pasar baik dalam skala na-

sional maupun internasional. Bahkan, esensi dari *public policy* adalah menenagakkan ketidakadilan dalam masyarakat dan alam justru tumpul akibat politisasi kebijakan dari oknum yang mengedepankan kepentingan saku dan dompet oknum elit.¹ Posisi kebijakan dan pemerintah seperti ini akan menjadi pembuka gerbong awal dari hampir seluruh aktifitas industri yang beroperasi di berbagai daerah Indonesia yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan hukum dan secara prosedural.

Bisa dilihat bahwa pada dasarnya memang krisis ekologi di Indonesia adalah krisis yang kompleks. Fenomena ini selalu dilihat dari kelompok yang merusak alam dengan menggunakan alat-alat berat yang mengerok tanah dan air, pembakaran hutan, limbah industri yang merambah ke lokasi perairan yang akrab dengan masyarakat bahkan minum dari air tersebut, dan lain sebagainya. Hanya dengan melihat itu saja masyarakat menganggap sebagai satu-satunya cara manusia merusak alam. Padahal sebenarnya jika melihat akar dari krisis ekologis, maka akan ditemukan bahwa ternyata peran politik dan politisasi kebijakan merupakan patologi terbesar bagi kelestarian lingkungan yang bisa melupakan eksistensi masyarakat adat yang hidup di atas tanah adat mereka.

Melihat isu tanah dan alam yang kian mengalami degradasi, konstruksi teologis hadir sebagai bentuk keberpihakan pada kerusakan alam yang melingkupi eksistensi masyarakat adat. Baik gereja maupun teologi, membawa kemaslahatan terhadap bentuk diskriminasi tanah dan membawa suara resistensif sebagai tanggung jawab teologis.

Di tengah gejolak hegemoni negara terhadap alam, masyarakat adat bergulat di tepian melawan logika pasar yang merusak ekosistem dan tanah. Seperti yang dijelaskan oleh John Prior, bahwa selama ini masyarakat adat mempertahankan 'tanah luhur' demi masa depan identitas budayanya sebagai bentuk apresiasi terhadap alam.² Fenomena tersebut menciptakan resistensi dari masyarakat adat terhadap pemerintah sekaligus sudah menjadi bagian dari fenomenologi di Indonesia yang kerap kali diperhadapkan pada pengajuan narasi peningkatan mutu ekonomi setempat.³ Hal inilah yang menjadi persoalan dilematis karena masyarakat adat berjuang untuk mempertahankan tanah mereka tetapi negara menganggap bahwa tindakan tersebut adalah penghambat kemajuan ekonomi. Kelompok publik yang tidak merasakan perjuangan masyarakat sering merespon isu tersebut secara pragmatis. Narasi penolakan oleh masyarakat adat kercap dibaca sebagai tindakan yang memistifikasi alam secara berlebihan sehingga suara ekologis mereka tidak mendengarkan.

Dalam banyak narasi publik di ruang digital, kerusakan alam seringkali dipotret secara permukaan untuk menunjukkan "kondisi aman". Akibatnya, masyarakat

¹ Torry Kuswardono, "Perampasan dan Perjuangan Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Oase Intim, 2022), 198.

² John Mansford Prior, "Hukum Adat dan Hukum Positif Berseberangan: Mana Peran Teologi Kristen? Catatan dari Pulau Flores," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Oase Intim, 2022), 46.

³ Denni H.R Pinontoan, "Berburu Emas di Tanah Leluhur. Tanah, Negara, Modal dan Gereja di Minahasa," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* (Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022), 179.

adat nampak utuh di layar, tetapi sesungguhnya kehilangan ruang hidup, identitas, dan budaya yang merupakan hasil dari interaksi masyarakat adat dengan alam. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat jauh dari isu dan tidak perlu menyuarakan hak masyarakat adat karena tidak adanya unsur urgent dan menyatakan sikap pro terhadap narasi peningkatan mutu ekonomi daerah saja.⁴ Padahal sebenarnya penyedia layanan buletin mengungkapkan unsur politik dan kondisi geografis yang rusak demi kemsalhatan masyarakat adat guna menyatakan sikap resistensi terhadap tindakan pemerintah yang menjadikan alam sebagai komoditas kapital terhadap alam melalui ruang digital.

Hal menarik yang diungkapkan Karel Phil Erari, bahwa sebenarnya krisis ekologi merupakan tanda dari krisis dialog.⁵ Minimnya transparansi membuat masyarakat berada pada posisi dilematis ketika harus menyatakan sikap terhadap kebijakan publik yang justru berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam. Hal ini menunjukkan bahwa ruang dialog menjadi ranah epistemik dalam menjawab persoalan krisis alam yang mampu menciptakan relasi resiprokal yang komunikatif agar tidak terjadi ketimpangan antara masyarakat adat dan berbagai kebijakan pemerintah. Kritik terhadap dominasi hierarki mengungkapkan ada dimensi struktural yang lebih dalam mengenai krisis ekologi sebagai indikasi dari upaya subalternisasi yang inheren dalam logika kapitalisme modern yang hidup bersamaan dengan neoliberalisme dari corak kolonialisme barat.⁶

Praktik hegemonik negara melalui akitifitas eksploitasi alam mendapatkan respons yang beragam sebagai wujud resistensi masyarakat adat, seperti demonstrasi yang dilakukan oleh kaum perempuan di Halmahera yang melawan legalitas pertambangan di pesisir pantai, karena bagi masyarakat Halmahera, laut adalah perarian yang tidak hanya kaya dengan ekosistem laut, tetapi laut juga dipenuhi dengan sosio-historis yang membentuk jati diri masyarakat Halmahera.⁷ Keresahan masyarakat Halmahera membentuk suatu komunitas yang disebut sebagai “Komunitas Maritim”. Komunitas tersebut terbentuk atas rasa solidaritas dan bersatu demi menyembuhkan luka kolektif yang diakibatkan oleh korporasi yang hanya menjadikan pantai sebagai alat komoditasi sumber daya sekitar.

Aktifitas sekitaran lahan yang menggantungkan kehidupan makan dan minum mereka diintervensi oleh korporasi lewat izin pemerintah.⁸ Pola hidup mereka pun

⁴ Jacky Manuputty, “Potret Perjuangan Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam Membangun Advokasi Lingkungan Berbasis Gereja,” dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* (Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022), 80.

⁵ Karel Phil Erari, “Revolusi Biru dari Timur: Suatu Refleksi dari Papua dalam Perspektif Pendekatan Konservasi Maritim,” dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* (Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022), 120.

⁶ Domingus Elcid Li, “Tanah Ulayat, Kapitalisme Global, dan Sikap Gereja,” dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* (Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022), 213.

⁷ Julianus Mojau, “Tanah Pesisir Pantai, Tubuh Erotis Allah?: Pergulatan Komunitas Iman Maritim Bersama Tanah Mereka,” dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* (Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022), 111.

⁸ Gomar Gultom, “HKBP dan Kasus Indrayon: Studi Kasus Tentang Respons Gereja Batak-HKBP terhadap Deforestasi di Tanah Batak,” dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* (Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022), 192.

mengalami perubahan karena keadaan yang mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan hadirnya pabrik. Bahkan masyarakat harus hidup dengan pola monotonisasi untuk menjual lahan yang sudah terkontaminasi oleh industri karena sudah tidak bisa lagi menghasilkan buah dari lahan mereka akibat korporasi yang berdiri disekitar-lahan mereka. Hal ini pun berdampak pada pola hidup serta kebudayaan dan identitas masyarakat sebagai petani mengalami degradasi dan menjadi titik tolak perlawanan mereka. Perlawanan tersebut bahkan bisa mewujudkan dalam bentuk resistensi primordial. Masyarakat adat melakukan resistensi primordial lewat ritus budaya yang berangkat dari relasi sakral antara alam dan manusia. Ini dikarenakan krisis ekologi menandai kerusakan identitas dan budaya mereka. Ekspresi komsologis tersebut bersifat heterogen tergantung pada daerah dan budayanya masing-masing. Misalnya dalam kasus dekat pesisir pantai Halmahera yang menuntut hak dan rekonsiliasi melalui ritual yang disebut 'Nyia' (doa batin meditatif di makam orang tua atau leluhur mereka) sebagai ekspresi perlawanan masyarakat melalui ritus adat.⁹

Ketimpangan kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap korporasi di tanah masyarakat adat semakin kronik. Misalnya pada tahun 1987-1988, PTP Nusantara XIV (Perkebunan Kelapa Sawit) berdiri di sekitar daerah Luwu Timur. Masyarakat sekitar desa Panca Karsa yang terkena dampak, mencoba membawa kasus ini ke meja hijau tetapi hakim justru menyerahkan gugatan operasional PTP Nusantara ke pemerintah agar menemukan jalan rekonsiliasi. Masyarakat korban pun merasa hakim lepas tangan dan tidak kooperatif terhadap pengajuan ini. Kasus ini terus berlangsung hingga pada tahun 1995 BPN Kabupaten Luwu Timur menerbitkan SK nomor 67/HGU/BPN/95 yang berisi perluasan lahan sekitar 814 hektare dengan jangka waktu 35 tahun dan berakhir pada tahun 2030.¹⁰

Fenomena seperti ini sudah seharusnya menjadi perhatian secara interdisipliner. Hal ini menandakan wacana sebagai titik tolak untuk melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi dan teolog. Keseriusan akademisi membawa transformasi melalui meja akademik untuk menyusun kerangka teoretis yang bersifat advokatif, atau bahkan provokatif demi mencapai keinginan masyarakat korban. Disiplin bidang antropologi sepertinya sukses dalam keterlibatannya dalam menjawab persoalan yang kompleks untuk mengangkat identitas budaya demi romantisasi nilai luhur sebagai langkah kritis-progresif. Misalnya, Mery Kolimon mengangkat spiritualitas orang Meto yang menganggap *afu* (tanah) adalah lemak sebagai representasi kekayaan, kesejahteraan dan kemakmuran.¹¹ Masih dari tanah Timor, Karen Campbell-Nelson menyatakan bahwa tanaman yang pertama kali tumbuh di Sumba adalah jagung. Berdasarkan cerita rakyat, jagung adalah satu-satunya tumbuhan yang cocok dengan kondisi tanah di Sumba. Jagung tersebut adalah awal dari seluruh

⁹ Mojau, "Tanah Pesisir Pantai, Tubuh Erotis Allah?: Pergulatan Komunitas Iman Maritim Bersama Tanah Mereka.", 103.

¹⁰ Lusia Palulungan, "Tanah Airku, Tertumpah Darahku, Catatan Harian Agustus 2005: Suku Pamona Memperjuangkan Hak atas Tanah Adat yang Terampas di Mangkutana," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* (Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022), 153.

¹¹ Mery L. Y. Kolimon, "Teologi Ramah Tanah di Timor Barat," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* (Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022), 5.

ekosistem yang ada di Sumba.¹² Dari ke dua narasi tersebut, dapat dilihat bahwa muatan kebudayaan dalam teologi sudah bagian dari struktur epistemik yang biasanya menjadi tanggung jawab antropologi. Dalam hal ini, masyarakat yang hidup bersama alam menjadikan alam sebagai bagian dari budayanya. Dalam beberapa budaya Timor, bahkan ada yang menganggap alam sebagai 'ibu' yang menunjukkan keakraban, keintiman dan keharmonisan mereka dengan alam contohnya seperti '*uis pah*' dalam budaya NTT yang dituliskan oleh Mery Kolimon. Dalam budaya Kalumpang, lahan perladangan dianggap sebagai '*pare*' (padi) sebagai simbol kehidupan dari tanah dan masyarakat Kalumpang percaya bahwa '*pare*' adalah ratu bagi mereka (*indo' pare*).¹³

Naskah teologis yang ramah terhadap isu tanah dan berpihak pada masyarakat adat sebagai korban menunjukkan keterlibatan sebagai dimensi pastoral dan semangat rekonsiliasi. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Tertius adalah dengan membaca Alkitab terkait isu tanah dalam Perjanjian Baru. Tertius mengingatkan bahwa isu tanah sangat penting jika dibaca menurut sejarah relasi antara Allah dan Abraham yang menjanjikan tanah Kanaan. Tanah Kanaan sendiri merujuk pada ajaran Yudhaisme.¹⁴ Dalam hal ini, Yudhaisme sangat akrab dalam teks-teks Perjanjian Baru dalam pelayanan Yesus sebagai figur yang Mesianik. Tertius mengungkapkan bahwa cukup menelisik perihal keterkaitan tanah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seharusnya menjadikan tanah sebagai subjek dalam Alkitab bukan sebagai objek. Ini menunjukkan relasi horizontal antara manusia dan alam serta relasi vertikal antara manusia dan Allah demi menjaga tanah sebagai tanggung jawab moral dan etika yang selaras dengan ajaran kekristenan dan gereja-gereja menjadikannya sebagai diskursus yang lebih dalam sebagai wujud implementasi teologis, misiologis, dan eklesiologis.¹⁵

Demi mencapai keutuhan eksistensi tanah, dibutuhkan pendekatan yang advokatif sebagai bagian dari "diakonia transformatif" yang strategis dalam ruang gerak gereja mengenai persoalan tanah dan ketidakadilan sosial yang terjadi. Langkah ini bisa dimulai melalui pembimbingan masyarakat adat demi menjaga alam sebagai identitas mereka. Salah satu langkah transformatif demi mencapai hak asasi masyarakat adalah menciptakan suatu gerakan secara kolektif sebagai wujud resistensi kebijakan negara dari usaha komoditas industri terhadap sumber daya. Langkah ini membutuhkan transparansi dari segi Undang-Undang Negara, legalitas industri, dan

¹² Karen Campbell-Nelson, "Tanah Timor Lele Bo: Antar Suci dan Susah," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* (Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022), 15–16.

¹³ Robert Patannang Borrong, "Batu Pare: Norma Mengelola Lahan Pertanian Masyarakat Kalumpang," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* (Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022), 126.

¹⁴ Tertius Y. Lantigimo, "Pentingnya Isu Tanah dalam Perjanjian Baru," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* (Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022), 269.

¹⁵ Aguswita Hildebrandt Rambe, "Tanah sebagai Per-Tanda Relasi Allah dan Manusia," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia* (Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022), 323.

analisis AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) kepada masyarakat adat demi menjamin kualitas massa yang rasional.¹⁶

Persoalan masyarakat adat yang kaya sumber daya menjadi lahan korporasi. Melalui masyarakat adat, logika kapitalisme menduduki industri di tengah kehidupan masyarakat adat. Ini adalah praktik kolonialisme yang selalu menyita korban karena ketertindasan. Pergulatan dan pengumpulan masyarakat adat inilah menjadi *locus* teologi untuk menanamkan teologi di tanah yang gersang demi menciptakan suara profetis di tengah ketidakadilan pasar. Konstruksi teologis yang berpihak pada korban, dalam hal ini masyarakat adat.

Buku *“Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosiologis”* hampir seluruhnya berisi perjuangan masyarakat adat, wacana negara atas komoditas sumber daya, transformatif teologis dan transformasi melalui ingatan atas kedaulatan dari nilai budaya. Terdapat 25 tulisan secara keseluruhan dari buku ini dan diantaranya ada 10 tulisan yang membahas intervensi korporasi dan negara terhadap masyarakat adat, 10 tulisan naskah teologis yang konstruktif sebagai daya transformatif demi kemaslahatan tanah dan masyarakat, 2 tulisan yang mengajak gereja sebagai agen advokasi atas krisis ekologis, 2 tulisan yang berupaya mengangkat jati diri masyarakat lokal dengan mengangkat relasi alam dan masyarakat sebagai budayanya, dan 1 tulisan berupa sajak berjudul “Adamah” sebagai pengantar reflektif atas alam yang terluka secara eksploitatif. Pengantar yang ditulis oleh Zakaria Ngelow mengajak pembaca untuk membumi bersama alam dan masyarakat adat atas persoalan kompleks dari krisis ekologi. Dalam kata pengantar juga terdapat risalah PGI yang secara formal menyatakan kepeduliannya dengan alam yang terluka dan secara tegas menyatakan bahwa merusak alam adalah tindakan melawan kehendak Sang Pencipta.

Tanggapan yang Tersisa

Buku ini berani membuka ruang kompleks terkait isu alam. Hampir keseluruhan isi menjelaskan bahwa kerusakan alam tidak hanya ditandai secara fisik saja, tetapi justru akar dari krisis lingkungan khususnya di Indonesia adalah posisi negara. Buku ini menggambarkan bahwa ternyata kebijakan negara adalah kunci utama dari krisis lingkungan yang masif. Sejauh tulisan yang dimuat, negara tidak menyatakan sikap egaliter dan hanya tergerus dalam logika kapitalisme. Ironinya adalah masyarakat adat menganggap alam sebagai kerabat terdekat, “ibu”, sedangkan kapitalisme menganggap alam sebagai modal dan pasar. Kerja sama internasional terjalin erat yang terhubung hanya karena kekayaan melalui hasil komoditas sumber daya yang merampas. Semua tulisan yang tertuang dalam buku ini sejalan dengan tujuan tema besar dari buku ini. Buku ini berhasil memperlihatkan ketimpangan sosial akibat kerusakan lingkungan dan krisis spiritual serta identitas masyarakat yang kian terkikis.

Secara keseluruhan, buku ini memiliki keberanian untuk menunjukkan kebijakan negara yang tidak pro terhadap masyarakat korban industri. Buku ini juga menyajikan daya antropologis terkait identitas masyarakat adat dengan budayanya.

¹⁶ Manuputty, “Potret Perjuangan Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam Membangun Advokasi Lingkungan Berbasis Gereja”, 86-91

Nilai-nilai luhur yang dihidupi secara kolektif menciptakan resistensi primordial seolah menunjukkan bahwa bukan hanya kerusakan alam yang terjadi, tetapi kerusakan budaya juga menjadi titik persoalan yang serius. Masyarakat adat seolah dilengserkan demi narasi kekayaan pendapatan ekonomi suatu daerah. Beberapa tulisan juga menunjukkan keragaman metodologis yang menarik. Beberapa tulisan memakai pendekatan sejarah, biblis, pastoral (karena bersifat advokatif), dan fenomena sebagai titik tolak transformasi. Berbagai tulisan dari buku ini tidak hanya bersifat konseptual karena mengajak pembaca untuk melakukan upaya transformatif yang berangkat dari kajian empiris dari beberapa tulisan yang ada dalam buku ini.

Buku ini cocok untuk semua kalangan baik bagi teolog, akademisi, tokoh agama, anggota jemaat, tenaga pendidik khususnya pada tingkat perguruan tinggi. Kontribusi buku ini signifikan karena mengangkat persoalan kontekstual dari sudut pandang masyarakat terpinggirkan. Ini adalah suatu topik yang sering diabaikan dalam studi bidang apapun di Indonesia. Itulah sebabnya, buku ini sangat relevan dengan konteks kekinian karena mengangkat degradasi keutuhan ciptaan yang terjadi sekarang ini yang sering disingkirkan oleh narasi besar seperti logika pembangunan, peningkatan mutu ekonomi, kesejahteraan masyarakat metropolitan dan lain sebagainya.

Meski demikian, buku ini tidak membahas banyak mengenai Undang-Undang yang berlaku terkait isu masyarakat adat. Misalnya RUU Masyarakat Adat sama sekali tidak diangkat secara eksplisit atau dalam satu pembahasan subjudul yang eksklusif. Meski buku ini terbit tahun 2022, tetapi isu RUU Masyarakat Adat muncul permukaan sudah sejak tahun 2018, 2020, dan 2025 yang hanya mandek dalam kursi DPR. Konstitusi ini harusnya menjadi potensi kuat, mengingat dikursus masyarakat adat jarang dibicarakan bahkan untuk menjadi unsur polemik di Indonesia. Berbagai tulisan dalam buku ini juga tidak diklasifikasi sesuai tema-tema tertentu. Ada beberapa tulisan yang membahas masyarakat adat, naskah teologis, dan upaya advokasi. Ada baiknya jika beberapa tulisan yang membahas isu yang sama dikategorikan dalam satu tema besar dan relevan dengan beberapa tulisan.

Penulis menganggap buku ini adalah ajakan untuk melihat bagaimana masyarakat adat menganggap alam sebagai *Communio Sanctorum* dalam wujud relasi manusia dengan para leluhurnya. Penulis juga menemukan bahwa ternyata isi buku ini didominasi oleh praktik kolonialisme dengan cara yang berbeda tetapi dengan semangat dan praktik yang sama dari zaman penjajahan yang sudah pernah terjadi di Indonesia dan buku ini sekaligus adalah wujud dekolonisasi. Beberapa pembaca yang memang giat terkait isu alam dan eko-teologi akan diingatkan kembali mengenai esai dari Lynn White. Tesis White sebetulnya tidak bisa ditolak sepenuhnya, karena White melihat kekristenan harusnya bertanggung jawab atas pesatnya perkembangan alam yang sejalan dengan roda kapitalisme yang terus berputar.¹⁷ Tuduhan atas teks Alkitab dalam Kejadian hanyalah spekulasi semata dari White. Tetapi yang ingin dikatakan oleh White adalah pelaku kerusakan alam adalah kekristenan, meski

¹⁷ Lynn White, "The Historical Roots of Our Ecological Crisis," *Science*, 155, no. 3767 (1967): 1203–1207.

demikian, kekristenan juga harusnya memiliki daya yang bahkan lebih besar untuk memulihkan alam ketimbang merusaknya. Seperti yang dinyatakan oleh Thomas Berry dalam buku *The Cry of The Earth* bahwa kekristenan yang kaya akan semesta-tinya mampu mendengarkan seluruh ciptaan, bukan hanya manusia. Menurutnya, sejauh ini manusia hanya “melihat” alam tetapi jarang “mendengarkan” alam.¹⁸ Karena inti dari pastoral adalah mendengarkan, maka manusia semestinya membuka diri terhadap alam untuk menjadi pendengar dan menjadi agen pastoral dalam bentuk apapun baik secara advokatif, teologis, atau menciptakan gerakan resistensi terhadap ketidakadilan sosio-ekologis.

Daftar Pustaka

- Berry, Thomas. “The World of Wonder,” dalam *Spiritual Ecology: The Cry of the Earth*, 11. California: The Golden Sufi Center, 2013.
- Borrong, Robert Patannang. “Batu Pare: Norma Mengelola Lahan Pertanian Masyarakat Kalumpang,” dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*, 126. Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022.
- Campbell-Nelson, Karen. “Tanah Timor Lele Bo: Antar Suci dan Susah,” dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*, 15–16. Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022.
- Erari, Karel Phil. “Revolusi Biru dari Timur: Suatu Refleksi dari Papua dalam Perspektif Pendekatan Konservasi Maritim,” dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*, 120. Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022.
- Gultom, Gomar. “HKBP dan Kasus Indrayon: Studi Kasus Tentang Respons Gereja Batak-HKBP terhadap Deforestasi di Tanah Batak,” dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*, 192. Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022.
- Kolimon, Mery L. Y. “Teologi Ramah Tanah di Timor Barat,” dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*, 5. Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022.
- Kuswardono, Torry. “Perampasan dan Perjuangan Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam,” dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*, 198. Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Oase Intim, 2022.
- Lantigimo, Tertius Y. “Pentingnya Isu Tanah dalam Perjanjian Baru,” dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*, 269. Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022.
- Li, Dominggus Elcid. “Tanah Ulayat, Kapitalisme Global, dan Sikap Gereja,” dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*, 213. Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022.
- Manuputty, Jacky. “Potret Perjuangan Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam Membangun Advokasi Lingkungan Berbasis Gereja,” dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*, 80. Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022.

¹⁸ Thomas Berry, “The World of Wonder,” dalam *Spiritual Ecology: The Cry of the Earth* (California: The Golden Sufi Center, 2013), 11.

- Mojau, Julianus. "Tanah Pesisir Pantai, Tubuh Erotis Allah?: Pergulatan Komunitas Iman Maritim Bersama Tanah Mereka," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*, 111. Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022.
- Palulungan, Lusia. "Tanah Airku, Tertumpah Darahku, Catatan Harian Agustus 2005: Suku Pamona Memperjuangkan Hak atas Tanah Adat yang Terampas di Mangkutana," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*, 153. Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022.
- Pinontoan, Denni H.R. "Berburu Emas di Tanah Leluhur. Tanah, Negara, Modal dan Gereja di Minahasa," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*, 179. Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022.
- Prior, John Mansford. "Hukum Adat dan Hukum Positif Berseberangan: Mana Peran Teologi Kristen? Catatan dari Pulau Flores," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*, 46. Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022.
- Rambe, Aguswita Hildebrandt. "Tanah sebagai Per-Tanda Relasi Alah dan Manusia," dalam *Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis di Indonesia*, 323. Jakarta: Oase Intim dan BPK Gunung Mulia, 2022.
- White, Lynn. "The Historical Roots of Our Ecological Crisis," in *Crisis* 155, no. 3767 (1967): 1203–1210.